

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN TOTAL BELANJA DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015-2024

Witri Widyastuti¹, Hailuddin², Sujadi³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram¹²³

e-mail: witriwidyastuti15@sma.belajar.id

Diterima: Tgl/Bulan/Tahun; Direvisi: Tgl/ Bulan/Tahun; Diterbitkan: Tgl/Bulan/Tahun

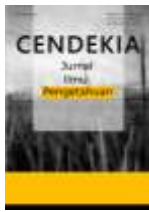
ABSTRAK

Kemandirian fiskal merupakan refleksi kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Mengingat tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja menjadi sangat krusial. Penelitian kuantitatif asosiatif ini menganalisis pengaruh PAD dan Total Belanja Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Kabupaten Lombok Barat periode 2015–2024 menggunakan data sekunder Laporan Realisasi APBD. Analisis data menerapkan regresi linear berganda dengan pendekatan *Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent* (HAC) Newey-West untuk mengoreksi autokorelasi dan heteroskedastisitas. Hasil riset membuktikan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal (koefisien = 0,373874; $p = 0,0001$), sedangkan Total Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan ($p = 0,2824$). Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan berdasarkan uji Wald F-statistic ($p = 0,000213$). Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,5463 menunjukkan bahwa 54,63% variasi kemandirian fiskal mampu dijelaskan oleh model ini. Temuan ini mengindikasikan fenomena *flypaper effect*, di mana ekspansi belanja belum efektif menstimulasi kapasitas fiskal daerah. Implikasinya, pemerintah daerah perlu mengintensifkan penerimaan PAD dan meningkatkan produktivitas alokasi belanja.

Kata Kunci: kemandirian fiskal, pendapatan asli daerah, belanja daerah, desentralisasi fiskal

ABSTRACT

Fiscal autonomy reflects a local government's capability to self-finance development and public services. Given the high reliance on central transfers, optimizing Locally Generated Revenue (PAD) and expanding expenditure efficiency are critical. This associative quantitative study analyzes the impact of PAD and Total Regional Expenditure on Fiscal Autonomy in West Lombok Regency (2015–2024) using secondary data from Budget Realization Reports. Multiple linear regression with Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (HAC) Newey-West standard errors was applied to resolve autocorrelation and heteroscedasticity issues. The empirical results demonstrate that PAD has a positive and significant effect on Fiscal Autonomy (coefficient = 0.373874; $p = 0.0001$), whereas Total Regional Expenditure shows no significant effect ($p = 0.2824$). Simultaneously, both variables significantly influence fiscal autonomy based on the Wald F-statistic ($p = 0.000213$). The coefficient of determination (R^2) of 0.5463 indicates that the model explains 54.63% of the autonomy variance. These findings confirm a flypaper effect, where increased spending fails to effectively stimulate local fiscal capacity. Consequently, the local government must intensify PAD collection and improve the productivity of budget allocations.



Keywords: *Fiscal Autonomy, Locally Generated Revenue, Regional Expenditure, Fiscal Decentralization*

PENDAHULUAN

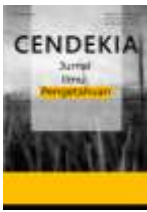
Penerapan otonomi daerah di Indonesia merupakan konsekuensi dari kebijakan desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri. Desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah tingkat kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaannya melalui sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri (Nurhasanah & Maria, 2017; Siregar & Pratiwi, 2017).

Kemandirian keuangan daerah menjadi aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah, semakin kecil ketergantungannya terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Sebaliknya, rendahnya tingkat kemandirian keuangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada sumber pendanaan eksternal dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu tujuan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah (Qisthina et al., 2020; Raudha & Abdullah, 2023).

Salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah secara umum menjadi komponen utama pembentuk PAD sehingga optimalisasi kedua sumber penerimaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan PAD berkontribusi positif terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah karena memperbesar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri (Dewantoro, 2022; Rahayu et al., 2024; Sundjoto et al., 2023).

Selain PAD, belanja daerah juga menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan kemandirian fiskal. Belanja daerah merupakan instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pengelolaan belanja yang efektif dan produktif diharapkan dapat menciptakan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan basis penerimaan daerah. Namun, apabila struktur belanja lebih banyak diarahkan pada pengeluaran yang bersifat konsumtif, maka kontribusinya terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah menjadi kurang optimal (Defitri, 2020; Nur & Endro, 2021).

Dalam praktiknya, hubungan antara pendapatan daerah dan belanja daerah tidak selalu berjalan ideal. Fenomena *flypaper effect* menunjukkan bahwa pemerintah daerah sering kali lebih responsif terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan dengan peningkatan PAD yang dimiliki daerah. Kondisi ini menyebabkan peningkatan belanja daerah tidak selalu diikuti oleh peningkatan kemampuan fiskal daerah secara mandiri. Akibatnya, ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat tetap tinggi meskipun alokasi belanja daerah terus meningkat (Fadilah & Helmayunita, 2020; Mulyani, 2016).



Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah. Fauziah dan Haryanto (2019) menemukan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil serupa juga ditemukan oleh Saraswati dan Nurharjanti (2021), Sefira dan Budiwitjaksono (2022), serta Rahayu et al. (2024) yang menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian fiskal. Sementara itu, penelitian Defitri (2020) dan Nur dan Endro (2021) menunjukkan bahwa komponen belanja daerah juga memiliki hubungan dengan tingkat kemandirian keuangan, meskipun besarnya pengaruh yang ditemukan berbeda-beda pada setiap daerah.

Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan adanya inkonsistensi. Beberapa penelitian menemukan bahwa belanja daerah, khususnya belanja modal, berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan penelitian lain menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan (Defitri, 2020; Novindriastuti & Purnomowati, 2020). Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu menganalisis komponen PAD maupun belanja daerah secara terpisah, misalnya hanya berfokus pada pajak daerah, retribusi daerah, belanja pegawai, atau belanja modal. Pendekatan tersebut berpotensi belum mampu menggambarkan secara menyeluruh pengaruh agregat sisi pendapatan dan sisi pengeluaran pemerintah daerah terhadap tingkat kemandirian fiskal (Sulistyawati et al., 2024; Utami, 2025).

Research gap penelitian ini terletak pada penggunaan variabel PAD total dan Total Belanja Daerah sebagai proksi agregat yang mewakili keseluruhan kemampuan pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kapasitas fiskal daerah dan tingkat kemandirian keuangan dibandingkan penggunaan komponen-komponen parsial sebagaimana dilakukan dalam sebagian besar penelitian sebelumnya.

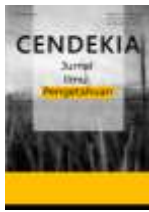
Kabupaten Lombok Barat dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, terutama pada sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa. Potensi tersebut memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD melalui berbagai sumber penerimaan daerah. Namun demikian, berdasarkan data Laporan Realisasi APBD Kabupaten Lombok Barat periode 2015–2024, tingkat kemandirian keuangan daerah masih menunjukkan pola yang fluktuatif. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan daerah dan belanja daerah belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian fiskal yang stabil.

Selain itu, periode penelitian 2015–2024 mencakup berbagai dinamika penting yang berpotensi memengaruhi kondisi fiskal daerah, termasuk dampak gempa bumi, pandemi COVID-19, serta masa pemulihan ekonomi pascapandemi. Berbagai peristiwa tersebut diduga memengaruhi struktur PAD maupun pola belanja daerah sehingga penting untuk dianalisis secara empiris dalam kaitannya dengan tingkat kemandirian fiskal daerah (Farild et al., 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Belanja Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Kabupaten Lombok Barat periode 2015–2024, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan kajian desentralisasi fiskal serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif.



Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan menguji hubungan dan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan data numerik yang dianalisis secara statistik. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk *time series* tahunan periode 2015–2024 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, dan mengolah data yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Total Belanja Daerah, serta tingkat Kemandirian Fiskal Kabupaten Lombok Barat selama periode penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan perangkat lunak E-Views 12.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kemandirian Fiskal Daerah (Y), yang diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Variabel independen terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1) dan Total Belanja Daerah (X_2). PAD merupakan agregasi dari seluruh komponen pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sementara itu, Total Belanja Daerah merupakan keseluruhan realisasi belanja pemerintah daerah yang tercantum dalam APBD.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan koreksi *Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent* (HAC) metode Newey-West. Penggunaan HAC Newey-West bertujuan untuk menghasilkan estimasi parameter yang lebih robust terhadap kemungkinan terjadinya heteroskedastisitas dan autokorelasi yang umum ditemukan pada data *time series*. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ln}Y = \alpha + \beta_1 \text{LnPAD} + \beta_2 \text{LnBELANJA} + \varepsilon$$

Keterangan:

LnY = Kemandirian Fiskal Daerah

LnPAD = Pendapatan Asli Daerah

LnBELANJA = Total Belanja Daerah

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi

ε = Error term

Seluruh variabel ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (*natural logarithm* atau Ln). Transformasi ini dilakukan untuk mengurangi perbedaan satuan pengukuran antarvariabel, memperkecil fluktuasi data sehingga lebih stabil, mengurangi potensi heteroskedastisitas, serta memudahkan interpretasi koefisien regresi dalam bentuk elastisitas.

Pengujian hipotesis dilakukan secara parsial menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap Kemandirian Fiskal Daerah. Selanjutnya, uji simultan dilakukan menggunakan uji Wald F-statistic untuk mengetahui pengaruh PAD dan Total Belanja Daerah secara bersama-sama terhadap Kemandirian Fiskal Daerah. Selain itu, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi Kemandirian Fiskal Daerah.

Penggunaan variabel PAD dan Total Belanja Daerah sebagai variabel agregat dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh sisi pendapatan dan sisi pengeluaran pemerintah daerah terhadap tingkat kemandirian fiskal. Pendekatan ini juga

dapat meminimalkan potensi multikolinearitas yang sering muncul apabila komponen-komponen pembentuk PAD maupun belanja daerah dimasukkan secara terpisah dalam model regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) dan koreksi *Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent* (HAC) *standard error* Newey-West pada aplikasi *EViews 12*, diperoleh persamaan regresi pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: LNY
Method: Least Squares
Date: 04/29/26 Time: 19:15
Sample: 2015 2024
Included observations: 10
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 3.0000)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.24937	27.97588	0.938286	0.3793
LN_PAD	0.373897	0.044665	8.371140	0.0001
LN_BELANJA	-1.190687	1.022490	-1.164498	0.2824

R-squared	0.546319	Mean dependent var	2.924250
Adjusted R-squared	0.416696	S.D. dependent var	0.187693
S.E. of regression	0.143349	Akaike info criterion	-0.803745
Sum squared resid	0.143842	Schwarz criterion	-0.712970
Log likelihood	7.018727	Hannan-Quinn criter.	-0.903326
F-statistic	4.214677	Durbin-Watson stat	2.166041
Prob(F-statistic)	0.062896	Wald F-statistic	35.66657
Prob(Wald F-statistic)	0.000213		

Sumber: Data diolah, 2026

$$LnY = 26,2493 + 0,3738Ln_PAD - 1,1906Ln_BELANJA$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki koefisien sebesar 0,3738. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa setiap kenaikan PAD sebesar 1% akan meningkatkan tingkat kemandirian daerah sebesar 0,3738%, dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*). Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber pendapatan asli akan berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kemandirian fiskal daerah.

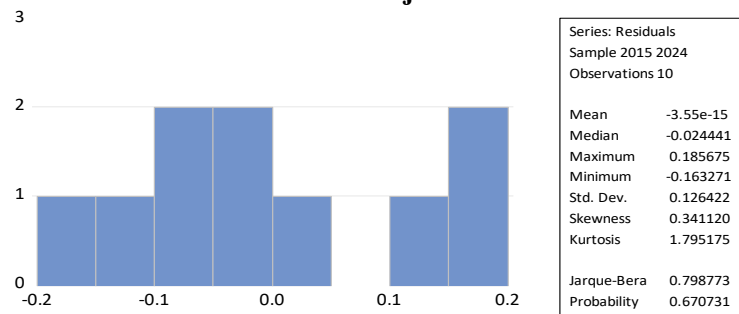
Sebaliknya, variabel Total Belanja Daerah memiliki koefisien sebesar -1,1906. Artinya, setiap kenaikan Total Belanja Daerah sebesar 1% akan menurunkan tingkat kemandirian daerah sebesar 1,1906%, dengan asumsi variabel lain konstan. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan belanja daerah belum sepenuhnya diarahkan pada kegiatan yang mampu menghasilkan pendapatan atau meningkatkan kapasitas fiskal daerah sehingga dampaknya terhadap kemandirian fiskal masih bersifat negatif.

Uji Asumsi Klasik Model

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual model regresi berdistribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan metode *Jarque-Bera* (JB).

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 2 hasil pengujian diperoleh nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 0,6707. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual model terdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan periode sebelumnya. Pengujian dilakukan menggunakan metode *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
 Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.166210	Prob. F(2,5)	0.8514
Obs*R-squared	0.623395	Prob. Chi-Square(2)	0.7322

Sumber: Data diolah, 2026

Tabel 3 hasil pengujian menunjukkan nilai *Prob. Chi-Square* sebesar 0,7322. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi. Dengan demikian, residual pada model penelitian ini bersifat independen antarperiode pengamatan.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual pada setiap pengamatan.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
 Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.536426	Prob. F(2,7)	0.2798
Obs*R-squared	3.050627	Prob. Chi-Square(2)	0.2176
Scaled explained SS	0.594317	Prob. Chi-Square(2)	0.7429

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 4 hasil pengujian diperoleh nilai *Prob. Chi-Square* pada *ObsR-squared** sebesar 0,2176. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Dengan demikian, varians residual dapat dianggap homogen pada seluruh pengamatan.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan linear yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Indikator yang digunakan adalah nilai *Centered Variance Inflation Factor* (VIF).

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 04/29/26 Time: 20:27

Sample: 2015 2024

Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	782.6496	1330463.	NA
LN_PAD	0.001995	2221.824	1.077471
LN_BELANJA	1.045485	1357690.	1.077471

Sumber: Data diolah, 2026

Tabel 5 hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *Centered VIF* untuk variabel PAD dan Total Belanja Daerah masing-masing sebesar 1,0774. Nilai tersebut berada di bawah batas kritis 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami multikolinearitas. Dengan demikian, setiap variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen tanpa adanya hubungan yang terlalu kuat dengan variabel independen lainnya.

Uji Hipotesis

Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Pengujian parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap tingkat kemandirian daerah.

Tabel 6. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Dependent Variable: LNY

Method: Least Squares

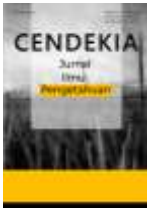
Date: 04/29/26 Time: 19:15

Sample: 2015 2024

Included observations: 10

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 3.0000)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic
C	26.24937	27.97588	0.938286
LN_PAD	0.373897	0.044665	8.371140
LN_BELANJA	-1.190687	1.022490	-1.164498



Sumber: Data diolah, 2026

Tabel 6 hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki nilai *t-statistic* sebesar 8,3711 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0001. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah Kabupaten Lombok Barat selama periode 2015–2024. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah diterima.

Sementara itu, variabel Total Belanja Daerah memiliki nilai *t-statistic* sebesar -1,1644 dengan nilai probabilitas sebesar 0,2824. Karena nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka Total Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh Total Belanja Daerah terhadap tingkat kemandirian daerah tidak dapat dibuktikan secara statistik.

Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Pengujian simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh PAD dan Total Belanja Daerah secara bersama-sama terhadap tingkat kemandirian daerah.

Tabel 7. Hasil Uji Simultan (Uji F)

R-squared	0.546319	Mean dependent var	2.924250
Adjusted R-squared	0.416696	S.D. dependent var	0.187693
S.E. of regression	0.143349	Akaike info criterion	-0.803745
Sum squared resid	0.143842	Schwarz criterion	-0.712970
Log likelihood	7.018727	Hannan-Quinn criter.	-0.903326
F-statistic	4.214677	Durbin-Watson stat	2.166041
Prob(F-statistic)	0.062896	Wald F-statistic	35.66657
Prob(Wald F-statistic)	0.000213		

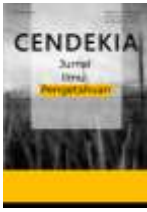
Sumber: Data diolah, 2026

Tabel 7 hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas *Wald F-statistic* sebesar 0,000213. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD dan Total Belanja Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah Kabupaten Lombok Barat selama periode 2015–2024. Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini.

Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai *R-squared* sebesar 0,5463. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebesar 54,63% variasi tingkat kemandirian daerah dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan Asli Daerah dan Total Belanja Daerah yang dimasukkan dalam model penelitian. Sementara itu, sisanya sebesar 45,37% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta berbagai faktor ekonomi dan kebijakan fiskal lainnya yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor yang berperan penting dalam meningkatkan tingkat kemandirian daerah di



Kabupaten Lombok Barat. Sebaliknya, Total Belanja Daerah belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kemandirian fiskal. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas dan produktivitas belanja daerah menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian agar belanja pemerintah dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah.

Pembahasan

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam Memacu Kemandirian Daerah

Berdasarkan estimasi model, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti memberikan dampak positif dan signifikan terhadap derajat kemandirian fiskal di Kabupaten Lombok Barat sepanjang kurun waktu 2015–2024. Argumentasi ini divalidasi oleh perolehan koefisien regresi sebesar 0,3738 dengan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,0001, yang berada jauh di bawah ambang batas alpha 0,05. Indikator empiris tersebut menegaskan bahwa ekspansi PAD berbanding lurus dengan peningkatan kapabilitas finansial otoritas lokal dalam mendanai program pemerintahan, menstimulasi pembangunan, serta menyelenggarakan pelayanan publik tanpa harus bersandar secara kronis pada pasokan dana transfer dari pemerintah pusat.

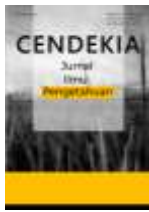
Di ranah teoretis, kedaulatan anggaran daerah merepresentasikan salah satu tolok ukur fundamental dari keberhasilan implementasi desentralisasi fiskal. Entitas daerah yang memiliki basis pemungutan PAD yang kuat cenderung memiliki fleksibilitas tinggi karena sanggup mengover kebutuhan belanja domestik melalui kapasitas pendapatan internalnya. Kesimpulan riset ini selaras sekaligus memperkuat kajian dari Raudha dan Abdullah (2023) serta Sulistyawati *et al.* (2024), yang menempatkan PAD sebagai determinan primer bagi penguatan kemandirian anggaran daerah di kancah nasional. Akibatnya, eskalasi kontribusi PAD terhadap struktur APBD akan secara otomatis mengerek indeks kemandirian fiskal daerah ke level yang lebih tinggi.

Dampak positif PAD terhadap nilai kemandirian lokal ini juga mengindikasikan bahwa sektor pajak daerah dan retribusi daerah tetap memegang peranan vital dalam memperlebar ruang fiskal pemda. Konklusi ini sejalan dengan amatan Dewantoro (2022), Rahayu *et al.* (2024), Saraswati dan Nurharjanti (2021), serta Sundjoto *et al.* (2023) yang mengonfirmasi peran strategis pajak dan retribusi lokal terhadap postur kemandirian finansial daerah. Karakteristik kedua instrumen ini yang cenderung stabil dan berkelanjutan menjadikannya fondasi ideal untuk membiayai agenda pembangunan daerah jangka panjang.

Karakteristik demografis dan ekonomi Kabupaten Lombok Barat yang ditopang oleh sektor pariwisata, niaga, jasa, dan korporasi mikro menjadi justifikasi logis atas temuan empiris ini. Dinamika aktivitas ekonomi tersebut sukses mengamankan penerimaan dari pajak hotel, restoran, sektor hiburan, serta berbagai pungutan retribusi yang berujung pada akumulasi nilai PAD. Hubungan kausalitas ini mengonfirmasi hasil analisis Vellia dan Mildawati (2021) yang menyatakan bahwa optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi merupakan pilar krusial dalam memperkuat struktur fiskal dan menjamin keberlangsungan belanja daerah.

Temuan dalam riset ini juga memvalidasi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauziah dan Haryanto (2019), Nur dan Endro (2021), Sefira dan Budiwitjaksono (2022), serta Utami (2025) yang sepakat bahwa PAD berkorelasi positif dengan penguatan kemandirian finansial lokal. Otoritas daerah yang jeli memetakan dan mengeksplorasi potensi pendapatan lokal akan memiliki keleluasaan anggaran (*fiscal space*) yang lebih longgar untuk mengeksekusi program prioritas sesuai karakteristik kebutuhan masyarakatnya.

Lebih jauh lagi, fenomena ini dapat dianalisis lewat korelasi timbal balik antara postur



pendapatan dan belanja daerah. Mulyani (2016) mengemukakan bahwa eskalasi pendapatan daerah akan memperluas daya dukung finansial pemda dalam merealisasikan belanja pembangunan serta investasi publik. Dengan kelonggaran fiskal tersebut, pemerintah daerah berpeluang besar mendongkrak mutu pelayanan publik sekaligus mengokohkan ketahanan finansial daerah dalam jangka panjang.

Sisi menarik dari temuan ini terletak pada cakupan periode pengamatan yang mengikutsertakan fase krisis pandemi COVID-19 dan masa pemulihan pascapandemi. Tatkala guncangan pandemi memicu resesi ekonomi global yang mendepresiasi pendapatan daerah di mayoritas wilayah Indonesia, Kabupaten Lombok Barat justru memperlihatkan resiliensi fiskal yang solid dengan mampu menjaga stabilitas penerimaan PAD. Anomali positif ini linear dengan tesis Farild *et al.* (2021) yang memaparkan bahwa situasi krisis memang mendisrupsi kinerja keuangan sektor publik, sehingga diperlukan manuver strategi yang adaptif guna mempertahankan kestabilan pos pendapatan.

Dalam spektrum yang lebih luas, kemandirian anggaran yang terakselerasi berdampak langsung pada *output* pembangunan makro. Siregar dan Pratiwi (2017) menguraikan bahwa daerah dengan kedaulatan fiskal yang matang memiliki probabilitas lebih tinggi dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi serta mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan kata lain, penguatan PAD tidak sekadar mempercantik angka laporan keuangan daerah, melainkan menjadi motor penggerak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif.

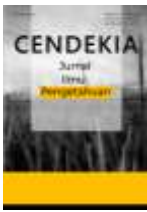
Analisis Pengaruh Total Belanja Daerah terhadap Kemandirian Anggaran Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, Total Belanja Daerah terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap derajat kemandirian fiskal di Kabupaten Lombok Barat selama kurun waktu 2015–2024. Fakta empiris ini ditunjukkan oleh perolehan nilai probabilitas sebesar 0,2824 yang berada di atas ambang signifikansi 0,05. Walaupun arah koefisien regresi secara statistik menunjukkan nilai negatif sebesar -1,1906, besaran dampak tersebut tidak memiliki kekuatan statistik yang cukup untuk mengonfirmasi perubahan pada level kemandirian keuangan daerah.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa bertambahnya volume belanja daerah tidak serta-merta menjadi katalis bagi penguatan kapasitas fiskal mandiri. Postur belanja yang gemuk terbukti gagal memacu pertumbuhan PAD apabila implementasinya tidak diorientasikan pada klaster produktif yang mampu menstimulus aktivitas ekonomi baru. Realitas ini menegaskan sebuah tesis bahwa efisiensi dan kualitas penyerapan anggaran jauh lebih krusial ketimbang sekadar mengejar besaran kuantitas nominal belanja yang dialokasikan oleh pemerintah daerah.

Hasil riset ini memperkuat kesimpulan dari Novindriastuti dan Purnomowati (2020) yang menyatakan bahwa alokasi belanja modal tidak selalu linier dengan peningkatan kemandirian keuangan lokal. Senada dengan hal tersebut, Defitri (2020) mengungkapkan bahwa penambahan pos belanja pegawai maupun belanja modal rentan kehilangan taji dalam menstimulasi kemandirian fiskal sepanjang penggunaannya belum mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan di daerah.

Absennya pengaruh signifikan dari variabel belanja ini juga memberikan sinyal bahwa sebagian besar struktur anggaran kemungkinan besar masih terserap untuk mendanai pos belanja rutin birokrasi, ketimbang dialokasikan pada investasi jangka panjang yang mampu menciptakan mesin pendapatan baru. Pola ini sejalan dengan temuan Nur dan Endro (2021)



serta Sefira dan Budiwitjaksono (2022) yang mengonfirmasi minimalnya kontribusi belanja pegawai terhadap akselerasi fiskal mandiri akibat sifat pengeluarannya yang murni bersifat operasional pemerintahan.

Menggunakan kacamata desentralisasi fiskal, nihilnya dampak belanja daerah ini dapat dikaitkan dengan anomali *flypaper effect*. Fadilah dan Helmayunita (2020) berargumen bahwa pemerintah daerah sering kali bersikap lebih responsif dalam membelanjakan dana transfer dari pusat ketimbang berupaya keras mengoptimalkan potensi PAD mereka sendiri. Implikasinya, lonjakan belanja daerah gagal mendorong kemandirian fiskal karena pembiayaan utamanya masih disokong oleh subsidi pemerintah pusat.

Temuan ini juga konsisten dengan analisis Qisthina *et al.* (2020) yang menyoroti bahwa profil kemandirian fiskal di berbagai daerah di Indonesia masih dihadapkan pada hambatan struktural berupa tingginya ketergantungan terhadap dana perimbangan. Dominasi dana pusat inilah yang mengakibatkan ekspansi belanja daerah belum mampu memberikan daya kejut instan terhadap peningkatan kedaulatan anggaran daerah.

Di sisi lain, studi dari Sundjoto *et al.* (2023) serta Saraswati dan Nurharjanti (2021) memperlihatkan bahwa belanja modal sejatinya tetap dapat memengaruhi kemandirian daerah dengan catatan dialokasikan secara presisi pada sektor riil yang produktif. Oleh sebab itu, tidak signifikannya pengaruh Total Belanja dalam riset ini menjadi sinyal mendesak bagi jajaran Pemkab Lombok Barat untuk mengevaluasi mutu dan efektivitas alokasi belanja agar mampu menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang bermuara pada penguatan PAD.

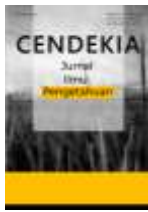
Dampak Simultan PAD dan Total Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Fiskal

Hasil pengujian secara serempak (simultan) memperlihatkan bahwa PAD dan Total Belanja Daerah secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap derajat kemandirian keuangan daerah. Kesimpulan ini didasarkan pada perolehan nilai probabilitas *Wald F-statistic* sebesar 0,000213 yang nilainya berada di bawah *error rate* 0,05. Hasil empiris ini membuktikan bahwa tinggi rendahnya kemandirian fiskal daerah tidak semata-mata ditentukan oleh keandalan dalam memungut pendapatan, tetapi juga dipengaruhi secara integratif oleh bagaimana instrumen belanja tersebut dikelola dan didistribusikan.

Berdasarkan capaian koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,5463, dapat disimpulkan bahwa 54,63% variabilitas pada tingkat kemandirian daerah Kabupaten Lombok Barat mampu dikonfirmasi oleh pergerakan variabel PAD dan Total Belanja Daerah. Sementara itu, porsi sisanya sebesar 45,37% digerakkan oleh determinan lain yang berada di luar batas pemodelan riset ini. Variabel luar tersebut di antaranya mencakup suplai Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dinamika makroekonomi wilayah, profesionalisme birokrasi, akuntabilitas tata kelola keuangan, serta regulasi fiskal makro lainnya sebagaimana dipaparkan oleh Nurhasanah dan Maria (2017), Raudha dan Abdullah (2023), Sulistyawati *et al.* (2024), serta Utami (2025).

Temuan ini memberikan pesan kuat bahwa akselerasi kemandirian fiskal menuntut adanya harmonisasi antara optimalisasi pemungutan pendapatan lokal dan efektivitas tata kelola belanja daerah. Perolehan PAD yang kokoh akan memperluas ruang manuver anggaran, sedangkan eksekusi belanja yang efisien dapat menstimulasi aktivitas ekonomi makro yang pada gilirannya akan memperluas basis penerimaan daerah pada periode fiskal berikutnya. Hubungan timbal balik ini menegaskan bahwa fungsi pendapatan dan belanja daerah bersifat komplementer (saling melengkapi) dalam mengonstruksi kemandirian fiskal.

Secara komprehensif, potret empiris ini mengukuhkan paradigma bahwa keberhasilan



misi desentralisasi fiskal tidak melulu soal kemampuan pemda mendongkrak angka PAD, tetapi juga tentang kecakapan mengalokasikan sumber daya finansial tersebut secara efisien dan berdaya guna. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat direkomendasikan untuk terus memperluas diversifikasi potensi PAD, mereformasi kualitas belanja daerah, serta memperkuat sistem tata kelola keuangan demi mewujudkan kemandirian daerah yang kokoh dan berkelanjutan.

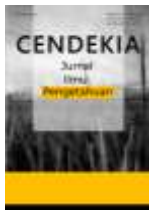
KESIMPULAN

Riset mengenai tata kelola keuangan Kabupaten Lombok Barat periode 2015–2024 membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi stimulus tunggal yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal (koefisien = 0,3738; $p = 0,0001 < 0,05$). Keberhasilan mengeskalisasi sektor pajak dan retribusi secara langsung memperkuat kapasitas pendanaan mandiri sekaligus mereduksi ketergantungan pada pusat. Sebaliknya, Total Belanja Daerah tidak memperlihatkan kontribusi nyata secara parsial ($p = 0,2824 > 0,05$) karena alokasi anggaran belum berorientasi pada sektor yang mampu menstimulus sumber penerimaan baru. Fenomena ini mengonfirmasi adanya gejala *flypaper effect*, di mana ekspansi belanja daerah lebih disetir oleh ketersediaan dana transfer pusat ketimbang produktivitas pendapatan internal. Namun secara simultan, perpaduan PAD dan Belanja Daerah terbukti valid dalam mengonfirmasi variasi Kemandirian Fiskal berdasarkan uji Wald F-statistic ($p = 0,000213 < 0,05$).

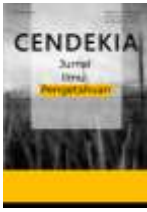
Melalui nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,5463, model ini mampu menjelaskan 54,63% fluktuasi kemandirian fiskal daerah, sementara sisa 45,37% lainnya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti DAU, DBH, DAK, efisiensi birokrasi, serta dinamika ekonomi regional. Secara komprehensif, konklusi riset ini mempertegas bahwa kedaulatan anggaran Kabupaten Lombok Barat bertumpu pada optimalisasi PAD, bukan pada kuantitas penyerapan belanja. Implikasinya, pemerintah daerah dituntut segera merestrukturisasi kebijakan fiskal melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, sekaligus mengalihkan orientasi belanja ke sektor produktif yang memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) demi mewujudkan desentralisasi fiskal yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badriyah, B. (2025). Rethinking character education in Islamic elementary schools: Trends, transformations, and strategic solutions in Madrasah Ibtidaiyah. *Ta'lim Diniyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. <https://doi.org/10.53515/tdjpai.v5i2.186>
- Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(2), 107–119. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.476>
- Dewantoro, D. A. (2022). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 38–47. <https://doi.org/10.56916/jimab.v1i2.174>
- Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). Analisis *flypaper effect* pada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah provinsi di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3144–3159. <http://jea.ppp.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/27>



- Farild, M., Bachtiar, F., Wahyudi, & Jannah, R. (2021). Analisis kinerja keuangan PT BNI Syariah Tbk sebelum dan pada saat pandemi COVID-19. *Assets*, 11(1), 88–95. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/view/21411>
- Fauziah, A. N. A., & Haryanto. (2019). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012–2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 17–30. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25545>
- Mulyani, H. (2016). The relationship of local own revenues and general fund allocation on capital expenditure of local government. *Global Conference on Business, Management and Entrepreneurship*, 163–166. <https://doi.org/10.2991/gcbme-16.2016.29>
- Novindriastuti, I., & Purnomowati, N. H. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan pemerintah daerah sebagai penguatan desentralisasi fiskal (Studi pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia tahun 2014–2018). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*, 8(1), 70–91. <https://jurnal.stienganjuk.ac.id/index.php/ojsmadani/article/download/88/62>
- Nur, E. I. F., & Endro, A. S. (2021). Pengaruh PAD, DAU, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1), 61–69. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.228>
- Nurhasanah, & Maria. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian kota di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(1), 60–73. <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jrtap/article/view/715/1473>
- Qisthina, F. A., Wahyudi, S. T., & Khusaini, M. (2020). Analisis kemandirian keuangan daerah di kabupaten dan kota SWP Gerbangkertasusila Plus. *Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis & Manajemen*, 10(2), 107–118. <https://doi.org/10.37932/j.e.v10i2.109>
- Rahayu, W., Syamsu, A. D., & Priyatmo, T. (2024). Pengaruh pajak daerah, DBH, dan DAK terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah di Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 38–56. <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.513>
- Raudha, N., & Abdullah, S. (2023). Systematic literature review: Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan. *Aktiva: Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 8(2). <https://doi.org/10.53712/aktiva.v8i2.2173>
- Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal, dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 51–64. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/download/1680/1144>
- Sefira, & Budiwitjaksono. (2022). Analisis PAD dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2020. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(3), 938–947. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/46304>
- Siregar, B., & Pratiwi, N. (2017). The effect of local government characteristics and financial independence on economic growth and human development index in Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 19(2), 65–71. <https://doi.org/10.9744/jmk.19.2.65-71>



- Sulistiyawati, A. I., Illyasa, N., Santoso, A., Nugroho, A. H. D., & Gusmao, C. (2024). Kajian empiris faktor-faktor penentu kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 23–35.
- Sundjoto, S., Rahayu, S., Fitrianty, R., & Hariawan, D. (2023). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil pajak, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(5), 1563–1579. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i5.477>
- Utami, M. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2007–2016. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 1(2), 283–292. <https://jiep.ulm.ac.id/index.php/jiep/article/view/2282>
- Vellia, F., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–18. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3728>